



BKPSDM  
KABUPATEN KEBUMEN

# RENCANA KERJA TAHUN 2023

**BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA  
MANUSIA**

Jalan Merdeka No. 2 Kebumen Telp (0287) 384264,  
381144-381410 Fax (0287) 381423  
KEBUMEN



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2023 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI KEBUMEN,  
ttd.  
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,  
ttd.  
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,  
  
IRA PUSPITASARI, SH., M.Ec.Dev  
Pembina  
NIP. 19800417 200604 2 015

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini dapat tersusun.

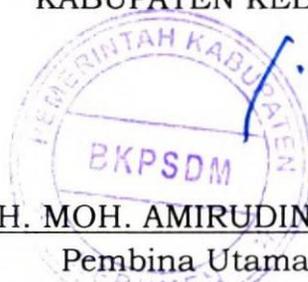
Buku ini berisi prioritas program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen 2021-2026 serta hasil evaluasi dan analisis kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen pada tahun 2022.

Dalam penyusunan rencana kerja ini seluruh pemangku kepentingan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen telah dilibatkan, sehingga dokumen ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Tentu saja buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan kami harapkan guna perbaikan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah di tahun yang akan datang.

Semoga buku rencana kerja ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 29 Juli 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KEBUMEN



H. MOH. AMIRUDIN, S.IP,MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 196804241998031011

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Landasan Hukum .....	5
C. Maksud dan Tujuan .....	7
D. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 .....	10
A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	10
B. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
C. Analisis Capaian Keuangan .....	19
D. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	20
E. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kegiatan Perangkat Daerah.....	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	42
A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	42
B. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah .....	43
C. Program dan Kegiatan.....	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	49
A. Prioritas BKPSDM yang Mendukung Prioritas Kabupaten .....	49
B. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	51
BAB V PENUTUP .....	58
A. Kaidah-kaidah Pelaksanaan .....	58
B. Rencana Tindak Lanjut.....	59

## **DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.1. Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2021 .....	10
Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Kebumen .....	12
Tabel 2.3. Ketercapaian Program BKPSDM terhadap RENSTRA s/d Tahun 2022.....	15
Tabel 2.4. Capaian Kinerja IKU BKPSDM Tahun 2021 .....	16
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	18
Tabel 2.6. Alokasi Anggaran BKPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021	. 19
Tabel 2.7. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Kebumen .....	26
Tabel 2.8. Rekapitulasi Anggaran Program BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2023 .....	40
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.....	45
Tabel 4.1. Prioritas BKPSDM yang Mendukung Prioritas Kabupaten.....	49
Tabel 4.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	52

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA -PD) untuk periode 1 (satu) Tahun.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah. Dokumen ini menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan fungsi yang diemban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen meliputi :

1. penyusunan rencana dan program di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. perumusan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

4. Melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. pelaksanaan koordinasi di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
6. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
7. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
8. pelaksanaan administrasi Badan; dan
9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 merupakan:

1. Pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
19. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2020;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Kredibilitas
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031;
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
  33. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  34. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1984);
  37. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah d Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
  38. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan

dilaksanakan pada Tahun 2023. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkindihadapi pada tahun mendatang;
3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 disusun dengan sistematika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

##### **Bab I. Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud Dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

##### **Bab II. Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021.
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  
Penjelasan tentang uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun kecamatan, kelurahan,

dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

**Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

- A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

**Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

- A. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten
- B. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

**Bab V. Penutup**

- A. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- B. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- C. Rencana Tindak Lanjut.

**LAMPIRAN :**

1. Berita Acara Forum Perangkat Daerah 2023 beserta lampirannya;
2. Daftar Hadir Forum Perangkat Daerah 2023;
3. Notulen Forum Perangkat Daerah 2023

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

**A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Tahun 2021 diperlukan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja tahun 2023.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah, Tahun 2021 BKPSDM menjalankan 3 Program dan 12 Kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Program dan Kegiatan BKPSDM**  
**Kabupaten Kebumen Tahun 2021**

No.	Program	No.	Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Kepegawaian Daerah	7	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		8	Mutasi dan Promosi ASN
		9	Pengembangan Kompetensi ASN
		10	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

No.	Program	No.	Kegiatan
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	Pengembangan Kompetensi Teknis
		12	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2022), mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun-tahun sebelumnya.

Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen sampai dengan Tahun 2021 dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 tercermin dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Kebumen**

Kode/ Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/S ub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BKPPD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja BKPSD M Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja BKPPD Tahun 2021	Realisa si Renja BKPPD Tahun 2021	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Jumlah Prosentase capaian seluruh program /jumlah program</b>	<b>Prosentase capaian kinerja pelayanan SKPD</b>								
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	20
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	20
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum BKPPD	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	20
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum BKPPD	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	20
5	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum BKPPD	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	20
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum BKPPD	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	20
2	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>Terfasilitasinya aparatur pemerintah sejak perekrutan, penempatan pengembangan karir</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>						

			<b>sampai dengan penghargaan prestasi</b>									
		7	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kebutuhan formasi ASN, penataran pengangkatan dan pemberhentian ASN	12 unit	11 unit	-	-	-	1 unit	1 unit	0,08
		8	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kebutuhan formasi ASN, penataan, pengangkatan dan pemberhentian ASN	8.951 unit	8.950 unit	-	-	-	1 unit	1 unit	0,11
		9	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya	78 unit	67 unit	11 unit	11 unit	100 %	5 unit	5 unit	0,64
		10	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah aparatur yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	50 unit	50 unit	-	-	-	-	-	-
	3		<b>Program pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya</b>	<b>26 dok</b>	<b>16 dok</b>	<b>5 dok</b>	<b>5 dok</b>	<b>100 %</b>	<b>5 dok</b>	<b>5 dok</b>	<b>0,19</b>
		11	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah pejabat yang mengikuti bimtek	26 dok	16 dok	5 dok	5 dok	100 %	5 dok	5 dok	0,19
		12	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya								

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Tabel 2.5 di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan target kinerja yang direncanakan dalam Rencana Strategis 2016-2021. Adapun mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 telah mengacu pada Rencana Strategis 2021- 2026. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan terdapat program dan kegiatan yang dilanjutkan pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2016-2021.

## **B. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 melaksanakan 3 program dan 12 kegiatan. Adapun analisa realisasi Rencana Kerja sebagai berikut :

1. Program yang mencapai realisasi 100% terdiri dari 3 program kegiatan yang kesemuanya terdiri dari 12 kegiatan.
2. Program kegiatan yang realisasinya rendah adalah program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan realisasi 39% dimana target semula 8.646 orang sedangkan realisasinya hanya 3.385 orang. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari 4 kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah dengan target 2.236 orang dengan realisasi 1.061 orang dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga CPNS formasi 2019 ditunda, kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah target 350 orang, realisasi 289 orang, Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah target 560 orang, realisasi 217 orang, dan Pengiriman peserta ujian dinas, ujian PI serta terbitnya ijin belajar dan penggunaan gelar target 5.500 orang, realisasi 1.818 orang dikarenakan adanya refocusing anggaran dan Pandemi Covid-19.
3. Dari Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2020 ada 5 kegiatan yang hanya dilaksanakan sampai dengan Tahun 2019 yaitu kegiatan Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar, Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN, Koordinasi penyelenggaraan diklat, Penyusunan data formasi dan DUK, Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, dan ada kegiatan yang sudah tidak dilaksanakan dari Tahun 2016 yaitu Penempatan PNS.

**Tabel 2.3**  
**Ketercapaian Program BKPSDM terhadap RENSTRA**  
**s/d. Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Nama Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Capaian %</b>
1	Program Penunjang Urusan	Meningkatnya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya sarana dan prasarana	100%

No.	Nama Program	Indikator Program	Capaian %
	Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		
2	Program Kepegawaian Daerah	Terfasilitasinya aparatur pemerintahan sejak perekrutan, penempatan, pengembangan karier sampai dengan penghargaan prestasi	100%
3	Program pengembangan sumber daya manusia	Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya	100%
<b>Rata-rata</b>			<b>100%</b>

Berdasarkan Tabel 2.3 Capaian Renstra BKPSDM sampai Tahun 2022 diperkirakan indikator program hanya dapat dilaksanakan 100% karena adanya beberapa kegiatan yang lebih sederhana karena adanya penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Tahun 2021 juga adanya Pandemi Covid-19 berakibat terhambatnya beberapa kegiatan BKPSDM. Pengurangan anggaran atau refocusing berakibat beberapa keluaran tidak dapat dilaksanakan sesuai target. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam renstra ditargetkan 8.646 orang dan terdiri dari 4 kegiatan tidak dapat dilaksanakan 100% dan diprediksi sampai dengan tahun 2022 hanya dapat tercapai 3.385 orang (39%) jauh dari target yang dibuat. Program pembinaan dan pengembangan aparatur yang dalam renstra ditarget 13.779 orang, sampai dengan tahun 2022 diperkirakan hanya tercapai 11.730 orang (85,13).

**Tabel 2.4**  
**Capaian Kinerja IKU BKPSDM Tahun 2021**

NO.	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)	Predikat Capaian 2021
1	Capaian peningkatan kapasitas sumber daya dan kedisiplinan aparatur	%	97,50	92,68	95,05	Berhasil

Berdasarkan Tabel 2.4 bahwa capaian kinerja IKU BKPSDM di Tahun 2021 lebih rendah 3,83% dibandingkan dengan target yang telah direncanakan yaitu 97,50% sedangkan capaiannya yaitu 92,68% yang disumbangkan oleh 3 sub indikator kinerja yaitu Prosentase pejabat

struktural yang telah mengikuti diklatpim 66,06% diperoleh dari jumlah pejabat yang telah mengikuti diklatpim/jumlah pejabat struktural yang ada x 100% (479/725) x 100%, Prosentase pegawai yang tidak dijatui hukuman disiplin 99,85% diperoleh dari jumlah pegawai yang tidak dijatui hukuman disiplin/jumlah pegawai yang ada x 100% (10.559/10.574) x 100%, Prosentase pejabat struktural 92,82% diperoleh dari jumlah pejabat struktural/pejabat struktural yang seharusnya ada x 100%.

Dari ketiga indikator tersebut selanjutnya dijumlah dan kemudian diambil rata-rata sehingga menghasilkan realisasi kinerja sebesar 86,24%. Untuk capaian kinerjanya 90,97% diperoleh dari realisasi dibagi target dikalikan 100% (86,24/94,80) x 100%. Hal tersebut dikarenakan adanya refocusing anggaran dan Pandemi Covid-19 sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal seperti kegiatan diklatpim yang diikuti oleh pejabat struktural. Kegiatan tersebut hanya dapat dilaksanakan sejumlah 479 orang dari jumlah pejabat struktural yang ada sejumlah 725 orang.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kebumen berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai, tata usaha kepegawaian, serta menyiapkan susunan program pendidikan dan pelatihan aparatur kepegawaian, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur/PNS serta latihan prajabatan. Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Meningkatkan kapasitas sumber daya dan kedisiplinan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan aparatur dengan target di Tahun 2022.

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Kabupaten Kebumen**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Cakupan Layanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah			100	100	100	100	100	100			IKU BKPSDM
1	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan			89,00	90,00	91,00	92,00	92,69	94,92			
2	Persentase ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya			68,09	70,04	72,08	73,18	80,73	76,26			

Berdasarkan data Tabel 2.5 di atas merupakan hasil evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 dengan pencapaian kinerja yang dinilai adalah tahun n-2 dan n-1 dari tahun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yaitu Tahun 2021 dan 2022. Dari evaluasi pencapaian kinerja tersebut indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diperoleh capaian realisasi 100%.

### C. Analisis Capaian Keuangan

Realisasi keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen pada Akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp.8.264.711.401,- atau sebesar 36,32% dari total anggaran sebesar Rp.22.755.290.000,-. Dengan capaian penyerapan 36,32% masuk dalam kategori Rendah (R) sedangkan rincian realisasi per jenis belanja tersaji sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 2.6**  
**Alokasi Anggaran BKPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021**

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN 2021	REALISASI 2021	%
	<b>Total Belanja</b>	<b>12.203.867.000</b>	<b>11.289.587.618</b>	<b>92,51</b>
<b>A.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>5.928.589.000</b>	<b>5.501.036.809</b>	<b>92,79</b>
	Belanja Pegawai	5.928.589.000	5.501.036.809	92,79
	Belanja Barang dan Jasa	6.188.266.000	5.701.400.309	92,13
<b>B.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>89.012.000</b>	<b>87.150.500</b>	<b>97,91</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.012.000	87.150.500	97,91

Berdasarkan Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa realisasi keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen untuk mewujudkan sasaran Tahun 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2020. Anggaran berkurang dari Rp. 22.755.290.000 menjadi Rp. 12.203.867.000 di Tahun 2021. Ini berarti anggaran berkurang sebesar Rp. 10.551.423.000, sedangkan capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami penurunan capaian dari 92,51% menjadi 36,32%. Penyebab pengurangan anggaran di Tahun 2021 adalah karena adanya pandemi Covid-19, dimana anggaran dilakukan refocusing untuk penanganan pandemi tersebut. Dilihat dari capaian kinerja berdasar RENSTRA BKPSDM Tahun 2016 - 2021 ada beberapa indikator sasaran yang tidak memenuhi 100% dikarenakan ada beberapa kegiatan yang terhambat dan tidak dapat dilaksanakan karena adanya Pandemi Covid-19 dan *Refocusing* anggaran.

## **D.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, maka kedudukan, tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen, adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam mengimplementasikan tugas pokok tersebut di atas, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- b. perumusan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- d. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- h. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masalah-masalah yang dihadapi selama lima tahunlalu berdasarkan tugas dan fungsi pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen diantaranya adalah :

1. Jumlah PNS belum sesuai dengan kebutuhan Formasi Tahun 2021 s.d 2026
2. Indeks Profesionalisme pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 masih rendah yaitu 43,95%, dengan komponen penilaian kualifikasi
3. Integrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dengan SIMPEG Kabupaten Kebumen belum dilaksanakan.Berdasarkan
4. Pengembangan Kompetensi PNS minimal 20 JP setahun masih rendah, berdasarkan data SIMPEG kabupaten Kebumen sebesar 20%,

5. Belum disusun Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai.
6. Belum tersusun Manajemen Pola Karir ASN sesuai dengan
7. Peraturan yang sudah ditetapkan Pemerintah.

Permasalahan pelayanan BKPSDM Kabupaten Kebumen dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal.

Faktor Internal yang mempengaruhi pelayanan BKPSDM yaitu :

1. Peta jabatan belum berdasarkan kebutuhan real perangkat daerah.
2. *Pemutakhiran* database SIMPEG belum optimal.
3. Monitoring dan Evaluasi Penegakkan Disiplin belum secara optimal dilaksanakan

Faktor eksternal yang mempengaruhi pelayanan BKPSDM yaitu :

1. PBD Kabupaten Kebumen untuk Belanja Pegawai masih di atas 50%.
2. Standar Kompetensi Manajerial (SKM) dan Standar Kompetensi Teknis (SKT) belum tersusun sepenuhnya
3. Sistem Manajemen Kinerja dan Remunerasi belum tersusun

Mendasarkan faktor internal dan eksternal tersebut dapat diidentifikasi masalah-masalah pokok di bidang kepegawaian yaitu :

1. Masih kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan.

Jawaban pemerintah dari tuntutan masyarakat terhadap efektivitas pelayanan publik dapat terlihat dari bagaimana Pegawai Negeri Sipil dapat bekerja secara profesional. Oleh karena itu, salah satu harapan dilaksanakannya reformasi birokrasi adalah mewujudkan sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil yang profesional yaitu pegawai yang mengerti hak dan kewajibannya, memahami tugas pokok dan fungsinya serta dapat melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki. Namun kenyataan yang ada sampai saat ini profesionalisme Pegawai Negeri Sipil masih belum dapat diwujudkan.

2. Belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian.

Data merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik. Begitu pula data yang berkaitan dengan kepegawaian, menjadi modal penting untuk pelayanan kepegawaian yang optimal. Proses pengolahan data dewasa ini dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informatika yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, namun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dalam mengaplikasikan data pegawai.

Meskipun telah tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), walaupun telah diintegrasikan dalam proses penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) namun masih perlu diintegrasikan dengan pelayanan administrasi kepegawaian seperti, SAPK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian Pegawai, Kenaikan Gaji Berkala, dan administrasi kepegawaian lainnya. Data pegawai yang lengkap dan *up to date* merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyusunan program perencanaan, peningkatan kapasitas serta pembinaan dan pengembangan karir sumber daya aparatur. Perencanaan yang dilakukan tanpa dukungan data yang lengkap dan akurat, dapat berakibat terhadap tidak sesuainya rencana yang disusun dengan kebutuhan pegawai. Untuk itu keberadaan sistem informasi manajemen kepegawaian ini perlu lebih dioptimalkan lagi, agar perencanaan dan pemberdayaan sumber daya aparatur lebih dapat ditingkatkan.

3. Peta jabatan yang disusun belum berdasarkan kebutuhan real perangkat daerah.

Dalam rangka penataan jabatan dan reformasi bidang sumber daya aparatur, perlu ditentukan peringkat jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan pegawai negeri berdasarkan nilai jabatan melalui evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan dilakukan untuk menentukan nilai jabatan yang selanjutnya akan digunakan dalam pemeringkatan jabatan. Hasil evaluasi jabatan berupa nilai dan peringkat jabatan ini dapat digunakan antara lain dalam penghitungan tunjangan, penempatan, dan penataan jabatan. Informasi Jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. Kondisi saat ini Perangkat Daerah belum menyusun Peta jabatan sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Salah satu isu strategis Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas. Merujuk pada hal tersebut Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Kebumen mempunyai isu strategis yang dihadapi pada Tahun 2021-2026 guna mendukung isu strategis daerah tersebut, yaitu:

**1. Tata kelola Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur.**

Manajemen ASN bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, pengelolaan manajemen ASN haruslah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tata kelola manajemen sumber daya manusia aparatur terdiri dari 18 elemen, dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, pengadaan, polakarier, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, penghargaan hingga pension dan perlindungan bagi ASN. Hal ini juga untuk mendukung terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN.

**2. Profesionalitas ASN.**

Kualitas Pelayanan kepada masyarakat sangatlah ditunjang adanya ASN yang professional, bermartabat dan berintegritas tinggi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat profesionalitas ASN, antara lain tingkat kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Pengembangan kompetensi menjadi faktor paling rendah, apalagisejakmasapandemi Covid-19 adakebijakan refocusing anggaran serta perubahan pola pembelajaran dari *classical* menjadi daring dan/ atau *blended learning*. Sehingga diperlukan inovasi dan upaya dalam peningkatan profesionalitas ASN, khususnya pengembangan kompetensi.

**3. Terintegrasi SIMPEG dengan SIASN**

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional meliputi seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah (SIMPEG) untuk mendukung program BKN, Satu Data ASN. Tujuan program layanan SIASN adalah untuk memperbaiki kualitas data ASN, khususnya menyangkut layanan manajemen kepegawaian. Melalui SIASN, setiap ASN dapat memantau progres layanan kepegawaiannya dengan menerima notifikasi via MySAPK atau email. SIASN juga sudah menerapkan *digital signature* sehingga proses layanan pengusulan kepegawaian tidak memakan waktu yang lama dan berbasis *paperless*. Dari aspek implementasi dan pengawasan sistem merit, ada dua sasaran pembangunan SIASN, yaitu:

- a. Menginternalisasi target tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Perpres 95/2018, khususnya tentang satu data ASN atau integrasi data ASN yang dimandatkan kepada BKN.

- b. Sistem ini akan digunakan untuk fokus pada penegakan hukum dan reformasi birokrasi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sesuai Perpres 54/2018. SIASN akan dimanfaatkan untuk transparansi pengisian jabatan di lingkup instansi pusat dan daerah.

#### **4. Pengembangan Karir PNS dan Merit Sistem**

Pengembangan Karir PNS dan Merit Sistem yang ada saat ini mengacu pada Permenpan RB Nomor 22 tahun 2021, tentang Pola Karier PNS. Pola Karier yang ada memberikan kesempatan yang lebih luas dan terbuka pada PNS untuk berkarier pada jabatan lainnya yang lebih tinggi baik vertical, horizontal dan diagonal sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh PNS tersebut. Guna merespon hal tersebut BKPSDM Kabupaten Kebumen perlu menyiapkan beberapa role antara lain :

- a. Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan social kultural) untuk setiap jabatan;
- b. Seleksi Terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ( JPT Pratama
- c. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi; dalam hal ini Pemetaan Kompetensi bagi PNS yang menduduki jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional, Pengawas dan Administrator agar dapat dikembangkan dan ditempatkan sesuai dengan Kompetensi yang dimiliki,
- d. Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;
- e. Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi;
- f. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
- g. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja;

#### **5. Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional dengan :**

- a. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;
- b. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan; dan Peningkatan kapasitas bagi semua PNS paling kurang 20 JP dalam setahun, guna meningkatkan kecakapan bekerja dan dalam upaya mendukung Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;
- d. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring;

## **E. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kegiatan Perangkat Daerah**

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023. Renja BKPSDM akan diimplementasikan melalui berbagai Program, kegiatan dan subkegiatan setiap tahunnya. Dokumen ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen. Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 juga memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang meliputi 1 urusan, 3 Program, 12 Kegiatan dan 31 sub kegiatan. Target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026, dan merupakan tahun pertama perencanaan, sehingga Renja Tahun 2023 sinkron dengan target Renstra Tahun 2023.

Review Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel 2.7 sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Kabupaten Kebumen**

**Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

No.	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BKPSDM Kab. Kebumen	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BKPSDM Kab. Kebumen	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun			
1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	27,200.000	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang	6 dokumen	27,200.000	Sesuai

No.	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
								tersusun			
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun.	2 Dokumen	15,200.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	15,200.000	Sesuai
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>BKPSDM Kab. Kebumen</b>	<b>Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>BKPSDM Kab. Kebumen</b>	<b>Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah</b>			
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah orang ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	48 orang	5,810,593,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48 orang	5,810,593,000	Sesuai
4	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi	6 dokumen	23,896,000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi	6 dokumen	23,896,000	Sesuai

No.	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	SKPD		keuangan SKPD			SKPD		keuangan SKPD yang tersusun			
	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>BKPSDM Kab. Kebumen</b>	<b>Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>BKPSDM Kab. Kebumen</b>	<b>Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 bulan</b>		<b>Sesuai</b>
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah jenis komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	4 jenis	14.120.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	14.120.000	Sesuai
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah paket bahan logistik kantor	2 paket	40.000.000	Sesuai
7	Penyediaan barang cetakan dan	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan penyediaan	12 bulan	33.540.000	Penyediaan barang cetakan dan	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah paket barang	10 paket	33.540.000	Sesuai

No.	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	penggandaan		barang cetakan dan penggandaan			penggandaan	en	cetakan dan penggandaan yang disediakan			
8	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	1.236.000	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	1.236.000	Sesuai
9	Penyediaan bahan/material	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan penyediaan bahan/material	12 bulan	34.810.000	Penyediaan bahan/material	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 paket	34.810.000	Sesuai
10	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 laporan	74.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 orang/kali	74.000.000	Sesuai
11	Penatausahaan Arsip	BKPSDM Kab.	Jumlah bulan	12 bulan	3.000.000	Penatausahaan Arsip	BKPSDM Kab.	Jumlah dokumen	12 dokumen	3.000.000	Sesuai

No.	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Dinamis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kebumen	penataan arsip dinamis			Dinamis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kebumen	penataan arsip dinamis pada SKPD	n		
	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>BKPSDM Kab. Kebumen</b>	<b>Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan</b>			<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>BKPSDM Kab. Kebumen</b>	<b>Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan</b>			<b>Sesuai</b>
12	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 unit	25.000.000	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	BKPSDM Kab. Kebumen	0	0	25.000.000	Sesuai
13	Pengadaan mebel	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah mebel yang disediakan	8 unit	30.000.000	Pengadaan mebel	BKPSDM Kab. Kebumen	0	0	30.000.000	
14	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	13 unit	318.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	13 unit	318.000.000	Sesuai
15	Pengadaan	BKPSDM	Jumlah unit	1 buah	290.000.00	Pengadaan	BKPSDM	Jumlah unit	2 unit	290.000.00	Sesuai

No.	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Kebumen	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan		0	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	M Kab. Kebumen	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan		00	
	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>BKPSDM Kab. Kebumen</b>	<b>Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>			<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>BKPSDM M Kab. Kebumen</b>	<b>Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>			<b>Sesuai</b>
16	Penyediaan jasa surat menyurat	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.200.000	Penyediaan jasa surat menyurat	BKPSDM M Kab. Kebumen	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	2.200.000	Sesuai
17	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	12 bulan	139.596.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BKPSDM M Kab. Kebumen	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	12 laporan	139.596.000	Sesuai

No.	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
			listrik					listrik yang disediakan			
18	Penyediaan jasa pelayanan umum	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum	12 bulan	30,000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	30,000.000	Sesuai
	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>BKPSDM Kab. Kebumen</b>	<b>Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>			<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>BKPSDM Kab. Kebumen</b>	<b>Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>			<b>Sesuai</b>
19	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	24 unit	97.895.000	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	24 unit	97.895.000	Sesuai

No.	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	dinas operasional atau lapangan		dan dibayar pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan			dinas operasional atau lapangan		dan dibayar pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan			
20	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	4 paket	58.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	21 unit	58.000.000	Sesuai
21	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara dan rehabilitasi	2 unit	20.600.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 unit	20.600.000	Sesuai
	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>BKPSDM Kab. Kebumen</b>	<b>Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan</b>			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>BKPSDM Kab. Kebumen</b>	<b>Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan</b>			<b>Sesuai</b>

No.	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>BKPSDM Kab. Kebumen</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>			<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>BKPSDM Kab. Kebumen</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>			<b>Sesuai</b>
22	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah kegiatan Pengadaan ASN	7 kegiatan	900.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 dokumen	900.000.000	Sesuai
23	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen pemberhentian ASN	600 dokumen	285.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	727 dokumen	285.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
24	Pengelolaan sistem kepegawaian	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen pemuktahiran data kepegawaian	3 dokumen	100.000.000	Pengelolaan system kepegawaian	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan system informasi kepegawaian	2 dokumen	100.000.000	
	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>										
25	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah kegiatan Pengelolaan Mutasi	3 kegiatan	290.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil kegiatan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan peaksana, dan mutasi ASN pemerintah daerah	136 dokumen	290.000.000	Sesuai
26	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab.	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	420.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab.	Jumlah dokumen	3 dokumen	420.000.000	Sesuai

No.	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
		Kebumen	pengelolaan promosi ASN				Kebumen	hasil pengelolaan promosi ASN	n		
	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>BKPSDM Kab. Kebumen</b>	<b>Jumlah ASN yang meningkatkan Kompetensinya</b>			<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>BKPSDM Kab. Kebumen</b>	<b>Jumlah ASN yang meningkatkan Kompetensinya</b>			<b>Sesuai</b>
27	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Pendidikan lanjutan	7 orang	50.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan lanjutan	157 orang	50.000.000	Sesuai
28	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan	300 dokumen	45.000.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	200 orang	45.000.000	Sesuai
	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>BKPSDM Kab. Kebumen</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penilaian dan</b>			<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>BKPSDM Kab. Kebumen</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penilaian dan</b>			<b>Sesuai</b>

No.	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
			<b>Evaluasi Kinerja Aparatur</b>					<b>Evaluasi Kinerja Aparatur</b>			
29	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	5 dokumen	65.000.000	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	5 dokumen	65.000.000	
30	Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	4 dokumen	73.130.000	Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	4 laporan	73.130.000	
	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>BKPSDM Kab. Kebumen</b>									
31	Penyelenggaraan Pengembangan	BKPSDM Kab. Kebumen	Penilaian dan evaluasi	5 kegiatan	520.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah ASN yang mengikuti	159 orang	520.000.000	Sesuai

No.	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	n Kompetensi Tekni Umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Kinerja Aparatur	en	pengembangan kompetensi			
	<b>Sertifikat Kelembagaan Pengembangan Kompetensi, Manajerial dan fungsional</b>	<b>BKPSDM Kab. Kebumen</b>				<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>BKPSDM Kab. Kebumen</b>				<b>Sesuai</b>

No.	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
32	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan daerah, Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah jenis diklat Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan daerah, Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	5 jenis	2.390.900.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan daerah, Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	7 laporan	2.390.900.000	Sesuai
	<b>Total Anggaran</b>				<b>12.227.916.000</b>					<b>12.227.916.000</b>	

Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 12.227.916.000,- terbagi dalam 2 urusan yaitu urusan kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan. Anggaran urusan kepegawaian sebesar Rp 9.317.016.000,- dan urusan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp. 2.910.900.000,-. Bila dilihat dari program yang dilaksanakan Tahun 2023, BKPSDM memiliki 2 program. Anggaran setiap program cenderung proposional, sedangkan anggaran terbesar Program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran Rp.7.088.886.000,- anggaran ini didalamnya ada gaji ASN sebesar Rp. 5.810.593.000,-. Tetapi pada Penetapan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 10.397.667.736,- terbagi dalam 2 urusan yaitu urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan. Anggaran Program Penunjang sebesar Rp. 6.634.205.736,- Program Kepegawaian sebesar Rp 1.732.486.000,- dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp. 2.012.976.000,-.

**Tabel 2.8**

**Rekapitulasi Anggaran Program BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2023**

No.	Program	Pagu Anggaran Rancangan Awal (Rp)	Pagu Anggaran Rancangan Akhir (Rp)
<b>A.</b>	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		
<b>I</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.088.886.000	7.088.886.000
2	Program Kepegawaian Daerah	2.228.130.000	2.228.130.000
<b>II</b>	<b>Unsur Pendidikan dan Pelatihan</b>		
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.910.900.000	2.910.900.000
<b>Jumlah Total</b>		<b>12.227.916.000</b>	<b>12.227.916.000</b>

Berdasarkan tabel di atas terdapat perbedaan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan kebutuhan, karena pagu pendanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023 Kabupaten Kebumen disesuaikan dengan hasil yang telah diterimabelum dilaksanakan, sehingga pagu anggaran sama dengan pagu yang ada di Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023 SIPD.

**B. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan Program/Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen selain bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga

berasal dari usulan para pemangku kepentingan, dalam hal ini Pokok-pokok Pikiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (politisi).

Tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat yang masuk untuk Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023.

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Perangkat Daerah mengemban tugas menjamin kelancaran penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil di daerah. Pada era sebelum Tahun 2015 manajemen kepegawaian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka manajemen kepegawaian mengalami perubahan yang signifikan. Menurut Undang-Undang kepegawaian yang lama manajemen Pegawai Negeri Sipil masih belum mengacu pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dikuasai calon Pegawai Negeri Sipil dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hal itu sudah tidak relevan lagi di masa sekarang ini. Manajemen Aparatur Sipil Negara yang dimaksud adalah pengelolaan Aparatur Sipil Negara untuk menghasilkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen Aparatur Sipil Negara diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit, yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manajemen Aparatur Sipil Negara ini meliputi Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.

Kebijaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara ini meliputi Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tujuan utama dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah Independensi dan Netralitas, Kompetensi, Kinerja/Produktivitas Kerja, Integritas, Kesejahteraan, Kualitas Pelayanan Publik, Pengawasan dan Akuntabilitas. Kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara terdiri dari manajemen Pegawai Negeri Sipil dan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Manajemen Pegawai Negeri Sipil meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, pensiun dan tabungan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan

manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Agar tugas tersebut berjalan efisien dan efektif diperlukan koordinasi yang baik dan lebih berkualitas dari para pemangku kebijakan baik dari unsur pemerintah pusat, propinsi maupun daerah.

Program prioritas kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan manajemen Aparatur Sipil Negara adalah kebijakan Reformasi Birokrasi, dimana dalam salah satu area perubahan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah pada area kelima yaitu Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.

Pada area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi terdapat beberapa aspek :

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
2. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
4. Penetapan kinerja individu
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
6. Pelaksanaan evaluasi jabatan
7. Sistem Informasi Kepegawaian

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut telah dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kebumen yang digulirkan mulai Tahun 2015 yang lalu, dimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah mengadakan internalisasi roadmap Reformasi Birokrasi tersebut dalam program dan kegiatan yang terbagi dalam beberapa tahapan kegiatan selama periode RENSTRA 2021-2026. Pada Tahun 2020, dilaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian tiap tahapan Reformasi Birokrasi yang diwujudkan dalam nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

## **B. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah**

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan serangkaian upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan bersama. Disitu terkandung komitmen bersama untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen yang mempunyai tujuan untuk terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik yang mempunyai indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Indikator Kinerja Utama Urusan yang terdiri dari prosentase penempatan PNS dalam jabatan dan persentase Pejabat Struktural dan Fungsional ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tujuan dan sasaran rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Target/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,97	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	86,00
	Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	%	73,06	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	93,99	93,99
	Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	65,66	68,09	70,04	72,08	73,18	75,09	77,21	77,21

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen sebagai tindak lanjut dan implementasi serta penjabaran dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen di bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia baik aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat luas, hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan penyusunan perencanaan strategis yang tepat dan ini merupakan renstra pertama kali yang akan dicapai di Tahun 2023.

### C. Program dan Kegiatan

Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 yang dirumuskan dalam program dan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain :

1. Pencapaian visi dan misi Bupati Kebumen Tahun 2021-2026 yang diwujudkan dalam Indikator Kinerja Utama Daerah
2. Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*
3. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 mencakup 3(tiga) program yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

No.	Program	No.	Kegiatan/Sub Kegiatan
<b>I</b>	<b>UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>		
	<b>KEPEGAWAIAN</b>		
<b>A.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
		A1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		A2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
		A3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		A4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
		A5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		A6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bagian Kantor

No.	Program	No.	Kegiatan/Sub Kegiatan
		A7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		A8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		A7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		A8	Penyediaan Bahan/Material
		A9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		A10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
		A 11	Penyediaan Kendaraan Dinas Operasi atau lapangan Kendaraan Dinas
		A12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		A13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
		A14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		A15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		A16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
		A17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		A18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		A19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>B</b>	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>7</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>
		B20	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
		B21	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

No.	Program	No.	Kegiatan/Sub Kegiatan
		B22	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
		<b>8</b>	<b>Mutasi dan Promosi</b>
		B23	Pengelolaan Mutasi ASN
		B24	Pengelolaan Promosi ASN
		<b>9</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>
		B25	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
		B26	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
		<b>10</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>
		B27	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		B28	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>		
<b>C</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>11</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>
		C29	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
		<b>12</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>
		C30	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Semua program dan kegiatan tersebut berlokasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dengan kelompok sasarannya adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Sedangkan pendanaan program dan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen dengan jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif program dan kegiatan Tahun 2023 sebesar Rp.12.227.916.000,-

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, serta untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Selaku Perangkat Daerah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, BKPSDM mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

**A. Prioritas BKPSDM Yang Mendukung Prioritas Kabupaten.**

Bahwa rencana kerja program, kegiatan dan subkegiatan prioritas BKPSDM yang mendukung Prioritas Kabupaten Tahun 2023, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Proritas Kabupaten**

<b>Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Program/kegiatan</b>	<b>Pagu</b>	<b>Ket</b>
<b>5.03.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>7.088.886.00</b>	
<b>5.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>42.400.000</b>	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	27.200.000	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.2 00.000	
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.834.489.000</b>	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.810.593.000	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	23.896.000	
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>200.706.000</b>	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.120.000	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	40.000.000	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	33.540.000	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.236.000	
5.03.01.2.06.07	Penyediaan bahan material	34.810.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	74.000.000	
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	3.000.000	

<b>Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Program/kegiatan</b>	<b>Pagu</b>	<b>Ket</b>
<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>663.000.000</b>	
5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	25.000.000	
5.03.01.2.07.05	Pengelolaan mutasi	30.000.000	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	318.000.000	
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	290.000.000	
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>171.796.000</b>	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.200.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	139.596.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum	30.000.000	
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>176.595.000</b>	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	97.895.000	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	58.000.000	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	20.600.000	
<b>5 03 02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>2.228.130.000</b>	
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>1.285.000.000.</b>	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan RencanaKebutuhan, Jenis danJumlah Jabatanuntuk PelaksanaanPengadaan ASN	900.000.000	
5.03.02.2.01.06	KoordinasiPelaksanaanAdministrasi Pemberhentian	285.000.000	
5.03.02.2.01.10	Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian	100.000.000	
<b>5.03.02.2.0.2</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>710.000.000</b>	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	290.000.000	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	420.000.000	
<b>5.03.02.2.0.3</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>95.000.000</b>	
5.03.02.2.03.04	PengelolaanPendidikan Lanjutan ASN	50.000.000	
5.03.02.2.03.14	FasilitasiPengembangan Karir dalam JabatanFungsional	45.000.000	
<b>5.03.02.2.0.4</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>138.130.000</b>	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	65.000.000	
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	73.130.000	

<b>Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Program/kegiatan</b>	<b>Pagu</b>	<b>Ket</b>
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>2.910.900.000</b>	
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>2.910.900.000</b>	
<b>5.04.02.2.0.1</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>520.000.000</b>	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	520.000.000	
<b>5.04.02.2.01</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>2.390.900.000</b>	
5.04.02.2.01.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.390.900.000	
<b>Jumlah Total</b>		<b>12.227.916.000</b>	

## **B. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

**Tabel 4.2**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5																		
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																		
5	03										9.317.016.000							25,855,108,000
5	03	01									7.088.886.000							9.796.455.000
5	03	01	2.01								42,400,000							38,522,000
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen data/informasi perencanaan pelaksanaan dokumen evaluasi yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 Dokumen	10 Dokumen	27,200,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	24,926,000
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun.	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	10 Dokumen	15,200,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	13.596.000
5	03	01	2.02								5.834.489.000							9,319.973,000
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah orang ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	48 orang	12 bulan	5.810.593.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	9.295,361,000
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 Dokumen	12 bulan	23.896.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	24,612,000
5	03	01	2.06								200,706,000							124,548,000
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bln 10 paket	6 bulan	14,120,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4,120,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	30,900,000
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	33,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	19,096,000
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	1,236,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,273,000
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan bahan/material	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	34,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	22,809,000
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 orang/kal	12 bulan	74,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	51,500,000
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penataan arsip dinamis	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	100%	12 bulan	12 bulan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3,000,000
5	03	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>663,000,000</b>						<b>26,620,000</b>
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	0 unit	1 unit	24.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	24,200,000
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	0 unit	1 unit	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung Kntor	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 unit	1 unit	318.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0
5	03	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>171.796.000</b>				<b>185,343,000</b>		
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	2,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2,420,000
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	139,596,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	131,423,000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	51,500,000
5	03	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>176,495,000</b>				<b>101,449,000</b>		
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	29 unit	50 unit	97.895,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	49,331,000
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20 unit	50 unit	58,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	30,900,000
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 unit	50 unit	20,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	21,218,000
5	03	02			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>							<b>2.228.130.000</b>				<b>3,132,309,000</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	03	02	2.01		<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>					<b>1,285,000,000</b>				<b>1,911,045,000</b>			
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	"Jumlah kegiatan Pengadaan ASN"	Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	7 kegiatan	3 kegiatan	900,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	90%	1,800,000,000
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	"Jumlah dokumen Pemberhentian Kepegawaian ASN"	Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	600 dokume	i3 kegiatan	285.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	90%	53,045,000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	Jumlah dokumen Pemutakhiran Data Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	2 dokumen	3 kegiatan	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	90%	58,000,000
5	03	02	2.02		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>					<b>700,000,000</b>				<b>490,087,500</b>			
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	Jumlah kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	jumlah kegiatan Mutasi dan promosi yang dilaksanakan	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	3 kegiatan	2 kegiatan	290,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	90%	250,290,000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	Jumlah kegiatan pengelolaan promosi ASN	jumlah kegiatan Mutasi dan promosi yang dilaksanakan	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	3 kegiatan	2 kegiatan	420,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	90%	350,000,000
5	03	02	2.03		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>					<b>95,000,000</b>				<b>77,000,000</b>			
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Pendidikan lanjutan	Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	386 orang	586 orang	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	90%	50,000,000
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	Jumlah dokumen SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan	Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	200 orang	586 orang	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	90%	27,000,000
5	03	02	2.04		<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>					<b>138.130,000</b>				<b>543,974,000</b>			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja aparatur	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	6 dokumen	2 kegiatan	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	90%	468,650,000	
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	Jumlah Jenis dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	4 dokumen	2 kegiatan	73,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	90%	75,124,000	
5	04				<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>							<b>2.910.900.000</b>				<b>10,790,000,000</b>		
5	04	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>							<b>2.910.900.000</b>				<b>5,395,000,000</b>		
5	04	02	2.01		<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>							<b>520.000,000</b>				<b>600,000,000</b>		
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase ASN Yang meningkatkan Kapasitasnya	Penilaian dan Evaluasi	Prosentase kegiatan pengembangan kompetensi teknis	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	6 kegiatan	100%	520,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase ASN Yang meningkatkan Kapasitasnya	70%	600,000,000	
5	04	02	2.02		<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>							<b>2.390.900.000</b>				<b>4,795,000,000</b>		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Prosentase ASN yang meningkatkan kapasitasnya	Jumlah jenis Diklat Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Jenis Diklat Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	5 jenis	5 jenis	2.390.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase ASN yang meningkatkan kapasitasnya	70%	4,795,000,000	
<b>TOTAL</b>												<b>12.227.916.000</b>				<b>36,645,108,000</b>		

Tabel 4.2  
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode				Urusan Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)					
															Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	1				PERENCANAAN													8.343.688.000				7.809.503.000
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													6.330.688.000				5.289.728.000
5	1	1	02.01		Perencana, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													52.500.000				78.508.000
5	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan penunjang urusan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun		100%	7 Dokumen	10 Dokumen	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%					
							Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun				7 dokumen											

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen berperan penting dan bertanggung jawab dalam peningkatan kinerja dan pembentukan sikap profesional Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen untuk mengambil kebijakan yang dapat ditindaklanjuti melalui pendekatan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka upaya-upaya peningkatan kemampuan baik kemampuan manajerial maupun kemampuan teknis dari segenap aparatur mendapatkan perhatian yang lebih mendalam.

Sejalan dengan itu, penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 ditujukan dalam rangka peningkatan kinerja aparatur dalam reformasi birokrasi pelayanan publik di bidang kepegawaian.

Rencana Kerja ini berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas Provinsi Jawa Tengah maupun nasional.

Memang tidak dipungkiri bahwa ketersediaan anggaran berdasarkan pagu indikatif tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023, hal tersebut karena menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

#### **A. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pejabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah yang ditarik dari visi, misi dan program Bupati terpilih yang perlu menjadi pedoman semua pihak di jajaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini adalah rumusan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

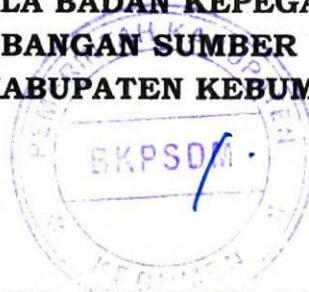
1. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah setiap tahun.
2. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran.
3. Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya.

## B. Rencana Tindak Lanjut.

Dalam penyusunan rencana kerja ini seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dan pemangku kepentingan telah dilibatkan, sehingga dokumen ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam menyusun program/kegiatan Tahun 2023 dan menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024, sehingga akan mampu meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi kinerja aparatur demi mewujudkan visi dan misi organisasi.

Kebumen, 29 Juli 2022

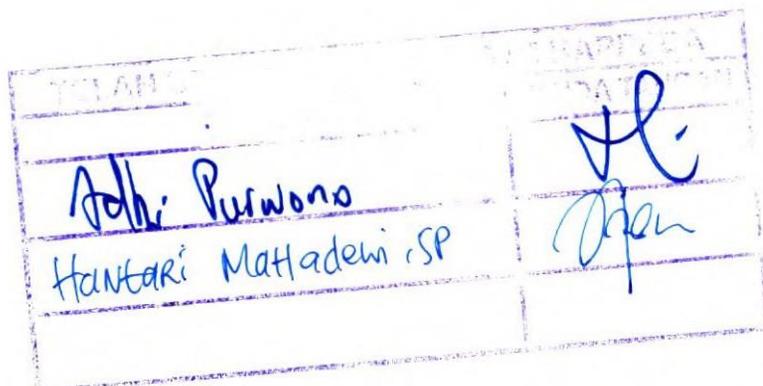
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KEBUMEN**



**H. MOH. AMIRUDIN, S.IP,MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196804241998031011





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Merdeka No : 2 Kebumen Telp. (0287) 381144 , 381410 , 384264  
Faksimile (0287) 384264 e-mail kepegawaian@kebumenkab.go.id  
Website <http://kepegawaian.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54311

Kebumen, 15 Februari 2022

Nomor 005.24  
Sifat Segera  
Lampiran 1 (Situ) Bendel  
Hal Forum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022  
Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahun  
Anggaran 2023

Kepada  
Yth. 1. Asisten Administrasi Umum Sekda  
Kabupaten Kebumen  
2. Inspektur Kabupaten Kebumen  
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Pendapatan Daerah  
4. Terlampir  
di -  
TEMPAT

Mergharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari/Tanggal : Rabu/16 Februari 2022

Waktu : Pukul 13.00 WIB - selesai

Tempat : Aula BKPSDM Kabupaten Kebumen

Acara : Forum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 BKPSDM Kabupaten  
Kebumen Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran  
2023

Keterangan : Memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KEBUMEN



H. MOH AMIRUDIN, S.IP., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP.196804241998031011

## TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kebumen
2.	Inspektur Kabupaten Kebumen
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
4.	Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen
7.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kebumen
8.	Camat Buluspesantren
9.	Camat Kebumen
10.	Camat Klirong
11.	Camat Pejagoan
12.	Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen
13.	Pejabat Struktural pada BKPSDM
14.	Para Subkoordinator pada BKPSDM
15.	Ketua PGRI Kabupaten Kebumen
16.	LSM Bina Insani Kabupaten Kebumen

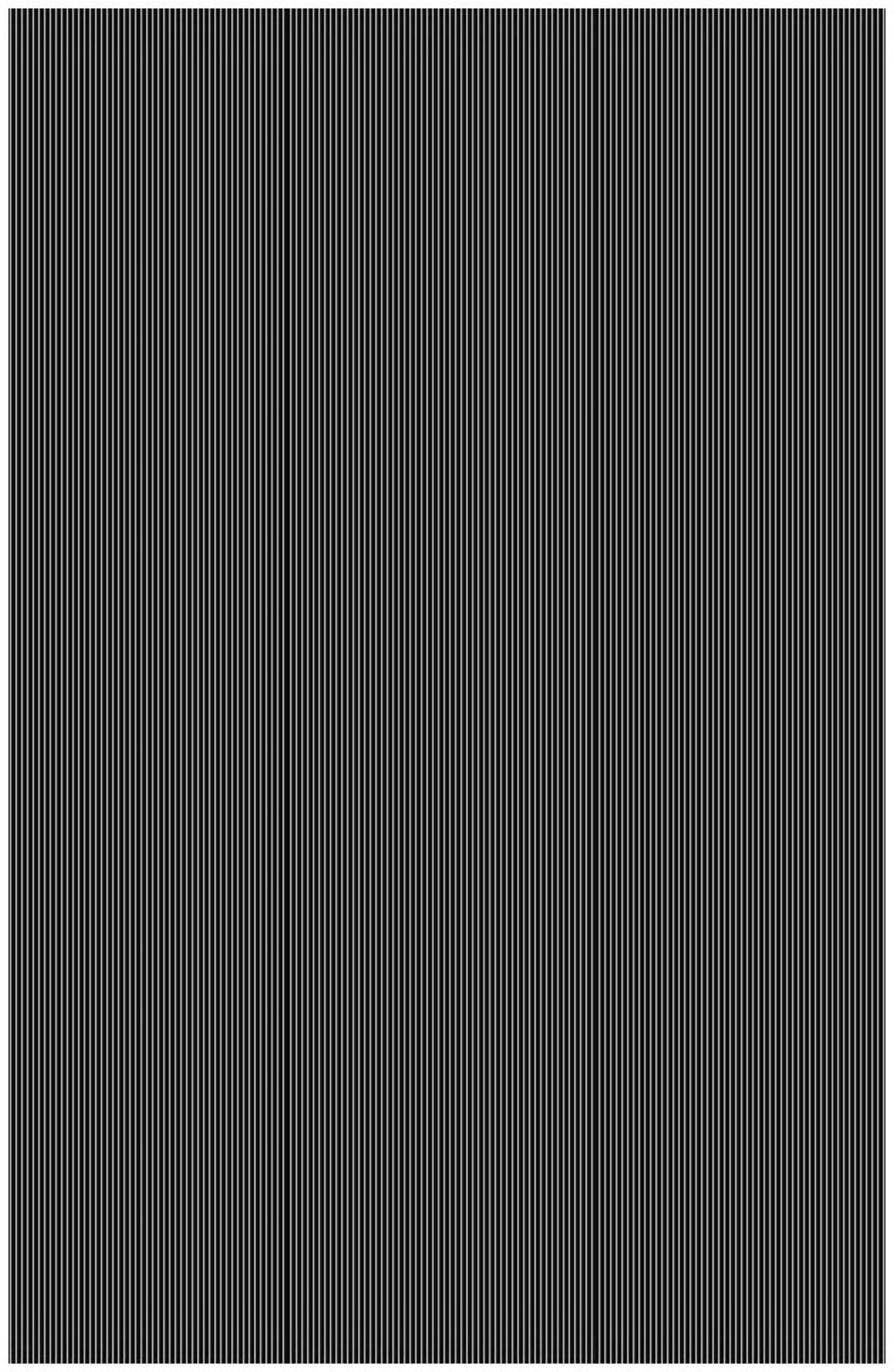
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

**SUSUNAN ACARA**  
**FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KEBUMEN**  
**HARI/TANGGAL : RABU, 16 FEBRUARI 2022**

<b>NO</b>	<b>WAKTU</b>	<b>MATERI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	12.30 – 13.00	Pendaftaran Peserta	Panitia
2	13.00 – 13.15	Pembukaan	Protokol
3	13.15 – 13.30	Pembacaan Tata Tertib	Protokol
4	13.30 – 14.00	Sambutan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah	BAPPEDA
5	14.00-14.45	Sambutan Ka.BKPSDM Kab. Kebumen dilanjutkan Pemaparan RENJA Tahun 2023	Ka. BKPSDM
6	14.45 – 15.30	Diskusi	Ka. BKPSDM
7	15.30 -15.45	Memilih , menetapkan delegasi Forum	Panitia
8	15.45 -16.00	Penandatanganan Berita Acara	Panitia
9	16.00 – 16.15	Penutup	Panitia

**TATA TERTIB FORUM PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA  
PENYUSUNAN RENJA TAHUN ANGGARAN 2023  
BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022**

1. Peserta forum hadir 5 menit sebelum forum dimulai;
2. Sebelum forum berlangsung telah dilakukan registrasi seluruh peserta forum;
3. Jika ada peserta forum yang terlambat datang, forum akan tetap dilanjutkan tanpa mengulangi agenda forum tersebut;
4. Sejak pelaksanaan forum dimulai peserta untuk dapat menggunakan alat komunikasi secara bijak sehingga tidak mengganggu pelaksanaan forum;
5. Seluruh proses sidang pleno akan diarahkan oleh seorang moderator dan seluruh peserta berkewajiban mematuhi arahan moderator;
6. Pendapat/pertanyaan dapat disampaikan oleh peserta kepada narasumber pada saat sesi diskusi yang dipimpin oleh moderator;
7. Jika ingin mengungkapkan pendapat/pertanyaan, peserta untuk dapat mengangkat tangan terlebih dahulu agar mendapat kesempatan berpendapat/bertanya yang ditentukan oleh moderator;
8. Pendapat/pertanyaan yang disampaikan harus sesuai dengan agenda yang dibicarakan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman;
9. Di akhir sidang pleno, dilakukan penyepakatan pemilihan delegasi forum RENJA OPD BKPSDM Kabupaten Kebumen serta penyepakatan dan penandatanganan berita acara hasil Forum RENJA OPD BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2022;
10. Wakil peserta yang ditunjuk untuk dapat menandatangani berita acara hasil forum sesuai arahan moderator dan panitia Forum RENJA OPD BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2022; serta
11. Peraturan yang belum tertulis akan ditambahkan jika diperlukan.



**LAPORAN PANITIA PENYELENGGARA FORUM PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2022**



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Kebumen**

Assalammu'alaikum. Wr. Wb. Selamat Siang, dan Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat :

1. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kebumen ;
2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kebumen;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen
5. Kepala Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olah Raga Kab. Kebumen
6. Kepala Bag. Administrasi Pembangunan Setda Kebumen;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kebumen;
8. Camat Bulus Pesantren
9. Camat Kebumen
10. Camat Klirong.
11. Camat Pejagoan
12. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen
13. Pejabat Struktural pada BKPSDM Kab. Kebumen
14. Para Subkoordinator pada BKPSDM Kab. Kebumen
15. Ketua PGRI Kabupaten Kebumen
16. LSM Bina Insani Kabupaten Kebumen

Terlebih dahulu marilah kita sejenak memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, pada siang hari ini kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan untuk dapat mengikuti Forum Perangkat Daerah BKPSDM Kab. Kebumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023, dalam keadaan sehat wal afiat.

Selanjutnya pada kesempatan ini, kami selaku panitia penyelenggara mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran bapak/ibu/saudara yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara ini.

Bapak/ibu/hadirin yang kami hormati.

Sehubungan dengan pelaksanaa Forum Perangkat Daerah BKPSDM Kab. Kebumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023, perkenankan kami selaku panitia penyelenggara melaporkan hal-hal sebagai berikut :

## I. Dasar pelaksanaan :

1. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kab. Kebumen Nomor 050/157.1 tanggal 31 Januari 2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun 2022 dan PAGU Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2023 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
2. DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kebumen Tahun Anggaran 2022

## II. Tujuan :

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk :

1. Memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah ;
2. Menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ;
3. Mempertajam indikator serta target program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Menyelaraskan program, kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas Pembangunan Daerah.
5. Menetapkan Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
6. Menyesuaikan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Dan prioritas pembangunan daerah pada Rancangan Renja Perangkat Daerah serta berbagai regulasi yang terkait;

## III. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kebumen Rencana Kerja Tahun 2023

dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Februari 2022, di Ruang Aula BKPSDM Kab. Kebumen.

## IV. Peserta :

Peserta Forum Perangkat Daerah terdiri dari :  
Kepala OPD terkait, Asisten Administrasi, Inspektur, BPKPD, BAPPEDA, DISDIKPORA, Bag. Administrasi, Bagian Organisasi, Camat Buluspesantren, Camat Kebumen, Camat Klirong, Camat Pejagoan, Komisi A DPRD, Pej. Struktural BKPSDM, Subkoordinator BKPSDM, PGRI, LSM Bina Insani.

## V. Nara Sumber :

Nara sumber dari BAPPEDA Kab. Kebumen,

## VI. Pembiayaan/Anggaran

Anggaran Forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kebumen bersumber dari APBD TA 2022.

Bapak/ibu/hadirin yang kami hormati.

Demikian yang dapat kami sampaikan, kami atas nama penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila dalam penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kebumen masih terdapat beberapa kekurangan,. Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Kebumen, 16 Februari 2022

Ketua Panitia Penyelenggara  
Forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Kebumen

BKPSDM

H. MOH. AMIRUDIN, S.IP.M.M.  
NIP. 19680424 199803 1 011

Form 15  
BERITA ACARA  
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022  
DALAM RANGKA  
PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

- a. Pemaparan Materi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2023 disampaikan oleh Ibu Kus Haryati, S.Si.,MT selaku Sekretaris BKPSDM Kabupaten Kebumen
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 16 Februari 2022

Jam : 13.00 s.d. 16.00 WIB

Tempat : Ruang Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen

Forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2022

MENYEPAKATI

KESATU : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen

KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen

KETIGA : Berita acara ini beserta lampiran dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan Sebagaimana mestinya.

Kebumen, 16 Februari 2022

a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KEBUMEN  
SEKRETARIS



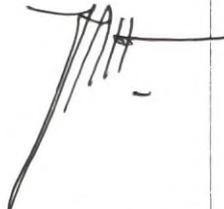
**KUS HARYATI, S.Si, MT.**

Pembina Tk. I

NIP. 19740118 199803 2 006

DELEGASI PERANGKAT DAERAH BKPSDM PADA FORUM RENJA TAHUN 2023

KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
	Dra. Sri Winarti, MH.	LSM Bina Insani	Pejagoan, Kebumen	

Kebumen, 16 Februari 2022  
A.N KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KEBUMEN

Sekretaris,



**KUS HARYATI, S.Si, MT.**  
**NIP. 197401181998032006**

Menyetujui

WAKIL PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	HANTARI MAHADEWI, S.P.	Unsur Perangkat Daerah BAPPEDA	Kebumen	1 
2	BASITI, S.Sos.	Unsur Kecamatan Klirong	Klirong	2 
3	KADAR	Unsur Lembaga PGRI	Kebumen	3 
4	Dra. SRI WINARTI, MH.	Unsur Masyarakat/ LSM Bina Insani	Pejagoan	4 

Kebumen, 16 Februari 2022  
A.N KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KEBUMEN  
Sekretaris



**KUS HARYATI, S.Si, MT.**  
NIP. 197401181998032006



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Veteran No. 2 Telp. (0287) 381144,381410,381205

FAX. (0287) 381423 K E B U M E N

---

**NOTULEN**

**RAPAT FORUM PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
TAHUN 2023 BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN**

---

Forum Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2023 yang dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 16 Februari 2022  
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Aula BKPSDM Kab. Kebumen  
Acara : Forum Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Peserta Sebanyak 40 orang terdiri dari Asisten Administrasi, Inspektorat, Kepala BPKPD, Kepala Disdikpora, Kepala Bag. Administrasi, Bag. Organisasi Camat Buluspesantren, Camat Kebumen, Camat Klirong, Camat Pejagoan, Ketua Komisi A DPRD, Ketua PGRI, LSM Bina Insani, semua Pejabat Struktural, Subkoordinator dan staf teknis BKPSDM Kabupaten Kebumen.

**I. Pembukaan**

Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 BKPSDM Kabupaten Kebumen dibuka dengan bacaan Basmallah bersama yang dipimpin oleh Pembawa Acara.

**II. Mendengarkan Lagu Indonesia Raya**

**III. Pembacaan Tata Tertib Forum Oleh Pembawa Acara**

**IV. Sambutan-sambutan**

1. Sambutan dari BAPPEDA ( Ibu Hantari Mahadewi, S.P.) tentang **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023**  
**Tema Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023**

“Pemantapan kualitas infrastruktur dalam rangka pengembangan perekonomian & pertanian serta peningkatan profesionalisme aparatur & kualitas Sumber Daya Manusia”

Dengan Strategi Pembangunan Tahun 2023 adalah :

1. Profesionalisme Aparatur
2. Peningkatan Kualitas SDM
3. Pengembangan Perekonomian Daerah
4. Pembenahan Infrastruktur Dasar dan Pendukung Ekonomi
5. Peningkatan Kondusifitas Wilayah

### **Bahan Forum OPD**

1. Rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Kemampuan Keuangan Riil Daerah
2. Daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang telah dientry oleh kecamatan dan telah divalidasi oleh Perangkat Daerah
3. Daftar Hasil Validasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Validasi oleh Perangkat Daerah
4. Informasi kegiatan yang bersumber dari APBN (Dana Alokasi Khusus dan Non Dana Alokasi Khusus) dan APBD Provinsi

### **Hasil Forum OPD**

1. Renja PD Tahun 2023 hasil entry SIPD
2. Daftar Usulan Kegiatan APBD Provinsi Sektorial yang telah memuat lokasi desa dan kecamatan
3. Daftar Usulan Kegiatan APBD Provinsi/Bankeu yang memuat lokasi desa dan kecamatan
4. Daftar Usulan kegiatan DAK yang memuat lokasi desa dan kecamatan
5. Daftar Usulan Kegiatan APBN Non DAK yang memuat lokasi desa dan kecamatan
6. Daftar Validasi terhadap Pokir DPRD berdasarkan hasil validasi melalui SIPD
7. Daftar Usulan Kegiatan APBD Provinsi/Bankeu yang memuat lokasi desa dan kecamatan
8. Berita Acara Forum Perangkat Daerah

### **Tindak lanjut**

- Berdasarkan PAGU Indikatif lakukan rapat internal melibatkan seluruh bidang dalam OPD sebagai bahan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sesuai jadwal (sudah dilaksanakan)
- Laksanakan Forum Perangkat Daerah dengan melibatkan stakeholder terkait sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran Bupati
- Keluaran yang dihasilkan dari Forum Perangkat Daerah dijadikan sebagai laporan hasil Forum Perangkat Daerah berupa Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah dengan lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Bupati
- Susun Renja Perangkat Daerah sebagaimana sistematika dan ketentuan dalam Lampiran Surat Edaran

2. Sambutan Dari BPKPD Kabupaten Kebumen ( Haris Setyawan, S.Kom. ME Kabid Anggaran BPKPD)  
Pemerintah Kabupaten Kota prioritas pembangunan tidak usah terlalu banyak.  
Kebijakan anggaran harus efektif dan efisien agar bisa hemat.  
OPD dalam rangka menyusun anggaran harus melihat Anggaran Kas.
3. Sambutan <sup>Maskhem</sup> Administrasi Umum Kabupaten Kebumen ( Drs. H. Maskhemi, M.Pd )  
Selamat untuk BKPSDM yang menyusun Forum Renja Tahun 2023 ini semoga forum berjalan lancar dan bermanfaat  
Sesuai dengan Peraturan Bupati, BKPSDM telah menjalankan tupoksi membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan Daerah. Sebelumnya bertanya Bagaimana cara mengatasi kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai ?
4. Paparan forum Renja tahun 2023 oleh Ibu Kus Haryati, M.Si.  
Memohon masukan dan saran dari pihak terkait  
Kegiatan Forum Renja Tahun 2023  
Masalah Pokok
  - Kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai
  - Penataan PNS
  - Pengembangan profesi belum optimal
  - Penggunaan teknologi informatika belum optimalForum Perangkat Daerah bertujuan secara umum untuk :
  - Untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat DaerahForum Perangkat Daerah bertujuan secara khusus untuk :
  - Menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah
  - Mempertajam indikator serta target program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
  - Menyelaraskan program, kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas Pembangunan Daerah
  - Menetapkan Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
  - Menyesuaikan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dan prioritas kegiatan.

Permasalahan pokok kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Kebumen antara lain :

- Kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai
- Penataan PNS belum seluruhnya berdasarkan pada kompetensi jabatan
- Pengembangan profesionalisme PNS belum optimal
- Penggunaan teknologi informatika belum optimal

#### **Program BKPSDM Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Program</b>	<b>Pagu Anggaran</b>
1	Program Kepegawaian Daerah	2.228.130.000
2	Program Pengembangan SDM	2.910.900.000
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.088.886.000
	Gaji PNS BKPSDM	5.810.593.000
	Belanja Rutin dan Sarpras	1.278.293.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.227.916.000</b>

#### **Anggaran Perprogram/Kegiatan Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Program/Kegiatan/subkegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
	<b>Program Penunjang Pemerintahan Urusan Daerah</b>	
1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.400.000
2	Administrasi Keuangan	5.834.489.000
3	Administrasi Umum	1.211.97.000
1	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	
	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.285.000.000
2	Mutasi dan Promosi Kepegawaian	710.000
3	Peningkatan Kapasitas ASN	95.000.000
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	138.130.000
	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	520.000.000
2	Sertifikat Kelembagaan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah	2.390.900.000

## **V. Diskusi dipimpin oleh moderator (Ibu Heny Agustin, S.IP. MM.)**

### 1. Pak Kadar dari PGRI

Formasi PPPK Tahun 2021 = 3.340 dan didanai dari Dirjen Perimbangan Keuangan, PPPK tahun 2021 sebanyak 2355 yang lolos, Pertanyaan :

1. Kenapa Ditahun 2022 Formasi P3K tidak ada untuk guru padahal Anggaran ada ?
2. Jika ada formasi NON Guru, tolong dialokasikan untuk tenaga kependidikan
3. Persoalan GTT dari Sekolah swasta bisa PPG sedangkan guru dari Sekolah negeri hanya mendapatkan surat keterangan dari Komite

### 2. Dari LSM Bina Insani Kabupaten Kebumen ( Bu Sri Winarti )

Pemetaan Kepegawaian , Peningkatan Kualitas Kepegawaian, terhadap Pelayanan kepada Masyarakat, dimana Problem Pengangguran meningkat.

Pelayanan Kepegawaian perlu adanya Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Merit Sistem perlu diterapkan, sehingga Kompetensi Kualifikasi sesuai dengan kebutuhan. Etos kerja Indonesia mengalami sentralistika

Kondisi pegawai sekarang dan pegawai besok bagaimana ?

### 3. Pengembangan layanan Kepegawaian dimohon dapat ditingkatkan dengan pengembangan Aplikasi SIMPEG missal dalam hal pelayanan SPTKG dan SKP dengan tanda tangan Elektronik.

### 4. Bagian Pembangunan ( Arief Maretyadi)

Kebutuhan Kompetensi bersifat ketrampilan untuk kebutuhan jabatan karena dari pendidikan belum tentu menguasai pengetahuan terkait tugasnya.

Pola di kelurahan butuh tenaga teknis dimana harus menarik tenaga dari DPU , harapan dari bagian pembangunan, bisa menarik skill dalam meminimalisir kecurangan. Seperti kasi Trantib di kecamatan memerlukan pengetahuan sesuai tugasnya.

## **V. Tanggapan Tanggapan**

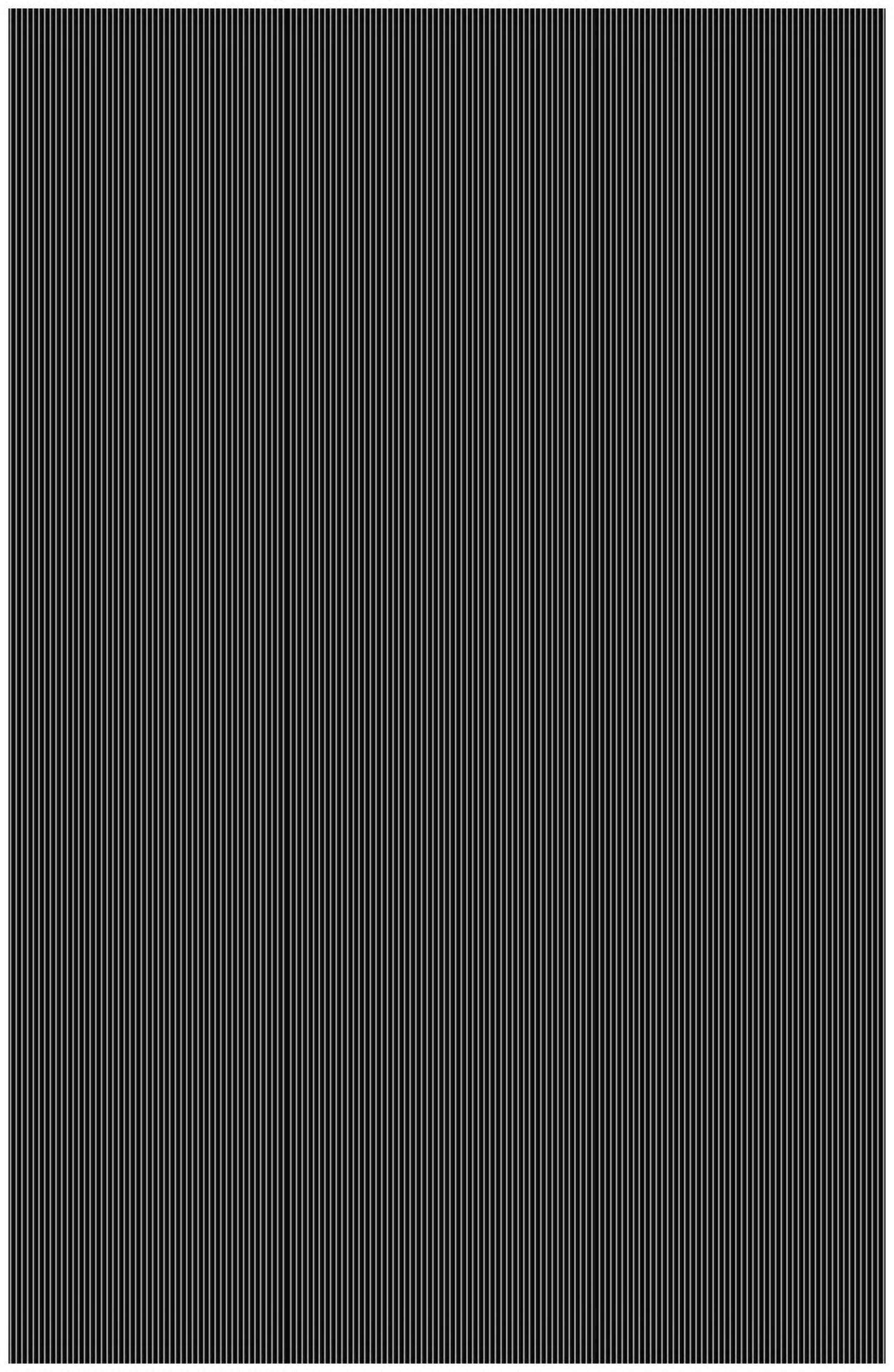
### **A. Tanggapan dari Ibu Kus Haryati, S.SI, MT.**

#### - Kebijakan terkait PPPK

Dana yang didengungkan ada untuk seluruh Formasi PPPK sebanyak 3000 orang, tetapi kenyataan di lapangan belum sesuai, Formasi PPPK sebanyak 2335 yang sudah ada Kita harus menata lagi dengan karena takut kedobelan formasi lagi,

Terkait anggaran yang sudah di alokasikan untuk GTT, perlu dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan , PGRI dengan BKPSDM sehingga tersinkronisasi sehingga penempatan PPPK tidak sama dengan GTT yang ada disekolah tersebut.

#### - Tanggapan untuk Ibu Sri Winarti



Sistem Merit versus Militansi , Reformasi dan Birokrasi Pegawai Pelayanan harus ramah setiap saat lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, sarana peningkatan di luar kota diprioritaskan, di Kebumen tempat pariwisata bisa mendongkrak masyarakat kurang mampu.

Akan dihitung ulang terkait Target anggaran untuk Peningkatan Kapasitas.

**B. Tanggapan dari BPKPD ( Haris Setyawan, S.Kom. ME)**

Belanja Pegawai Anggaran tahun 2021 Maksimal 30%

Sekitar 40% ( Belanja Pegawai) Tahun 2022 untuk dana transfer, padahal amanat Mendagri daerah harus menyesuaikan paling lama 5 tahun. Anggaran tahun 2022 tidak ada penambahan alokasi anggaran.

PGRI perlu audiensi khusus terkait keterbatasan DAU utk anggaran tenaga non PNS dengan Dewan.

**C. Tanggapan Bpk Drs. H. Maskhemi, M.Pd.**

1. Anggaran utk perimbangan dibahas secara bersama, terkait regulasi kebijakannya
2. Tenaga kependidikan non guru, ketika ada wacana dari pusat 1 sekolah 1 perpustakaan, sehingga ada kebutuhan tenaga perpustakaan yang banyak, pendidikan melalui UT
3. Peningkatan SDM di lingkungan pemerintah, sudah dimaksimalkan, layanan melalui IT.

**D. Tanggapan dr Ibu Kus Haryati, S.Si. MT**

1. Sudah direncanakan kalau proses usulan KGB bisa diproses online melalui fitur simpeg
2. Integrasi antara simpeg dengan tanda tangan elektronik
3. Pengembangan SDM melalui Peningkatan kapasitas sekretaris dihilangkan untuk akomodasi kebutuhan yang lain.
4. Karir JF ke depan akan dikoordinasikan dengan LAN , saat ini banyak yang beralih ke jabatan fungsional analis kebijakan. Untuk saat ini yang sudah tertata : Tenaga Pendidikan, Tenaga kesehatan dan Perencana

## VII. PENUTUP

Rapat Forum Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 BKPSDM Kabupaten Kebumen ditutup dengan bacaan Hamdalah bersama.

Demikian Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 16 Februari 2022

Mengetahui  
an. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KEBUMEN

NOTULIS



**KUS HARYATI, S.Si, MT.**  
NIP. 197401181998032006

**SRI NURYAENI, SE.**  
NIP. 197606021999032007



**FOTO KEGIATAN FORUM OPD TAHUN 2023**

**BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN**

**16 FEBRUARI 2022**



**DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH  
BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN**

Kabupaten : Kebumen  
 Tanggal : 16 Februari 2022  
 Tempat : Ruang Aula BKPSDM Kabupaten Kebumen

NO.	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT NO TELEPON	TANDA TANGAN
1	Kus Haryati	BKPSDM	087715023970	
2	Maskhemi	As 3		
3	Hler Fatimah	Kec. Bulusp.	08895311929	
4	Hario S.	BPEPD	081328677433	
5	Arjiyanto M.	AP	081910423816	
6	Basiti	Kec. Kliwong	085200023880	
7	Hantani M.	Bappera	085327232421	
8	Kagur	PERI Kbm		
9	Bawono Andiw.	BKPSDM	0812 2835 2800	
10	Kes Dewik	BKPSDM	0877 8942 92	
11	Heny Agustina	BKPSDM	0813 9205 5927	
12	Prastowo An	BKPSDM	0878 3789 0727	
13	Mahyudi	BKPSDM	0812 2242 3321	
14	Dwi Muryani	BKPSDM	0817 249331	
15	Suwanto	BKPSD	0821 3553 5354	
16	Sekar Safiti	BKPSDM	08529264 5000	
17	Okti Sulistyani	BKPSDM	08534203 8984	
18	Resto A.	BKPSDM	0821 36275223	
19	Agus Yuni	BKPSDM	0813 9267 6606	
20	Muhajir	BKPSDM	08131048 9483	
21	Tanti ND	BKPSDM	081542979810	
22	Hary - S	BKPSDM	081327445 988	
23	Ibnu H.	Organisasi	08976217978	
24	Retno S.	BPEPD	08179550004	

NO.	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT NO TELEPON	TANDA TANGAN
25	Sri Winati	Bina Insani		25
26	Dandi	Disdik	082 21001056	26
27	Dwi Harini	Kec. Kebun	085291087799	27
28	Sekar Satiti	BKPSDM	0852 9264 8200	28
29	Suwanto	BKPSDM.	0821 3553 5354	29
30	Lies Dewi K		0877 894292	30
31	Suparjon	BKPSDM	0813 9088 676	31
32	Sri Nuryaeni	BKPSDM	082 324 888 686	32
33	Lasinah	BKPSDM	0813 2759 4779	33
34	Siti Komalawati	BKPSDM	0878 37 903 373	34
35	Diah Astarini	BKPSDM	0882 2850 4733	35
36	Suminarsih	BKPSDM	08380608132	36
37	Minia	BKPSDM	0821 3794 0661	37
38	Ratnigno	BKPSDM.	087715349412	38
39	Imam M.	BKPSDM	087834218368	39
40	Kairo	BKPSDM.	087728 595533.	40

Kebumen, 16 Februari 2022  
A.N KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KEBUMEN  
Sekretaris.



**KUS HARYATI, S.Si, MT.**  
NIP. 197401181998032006



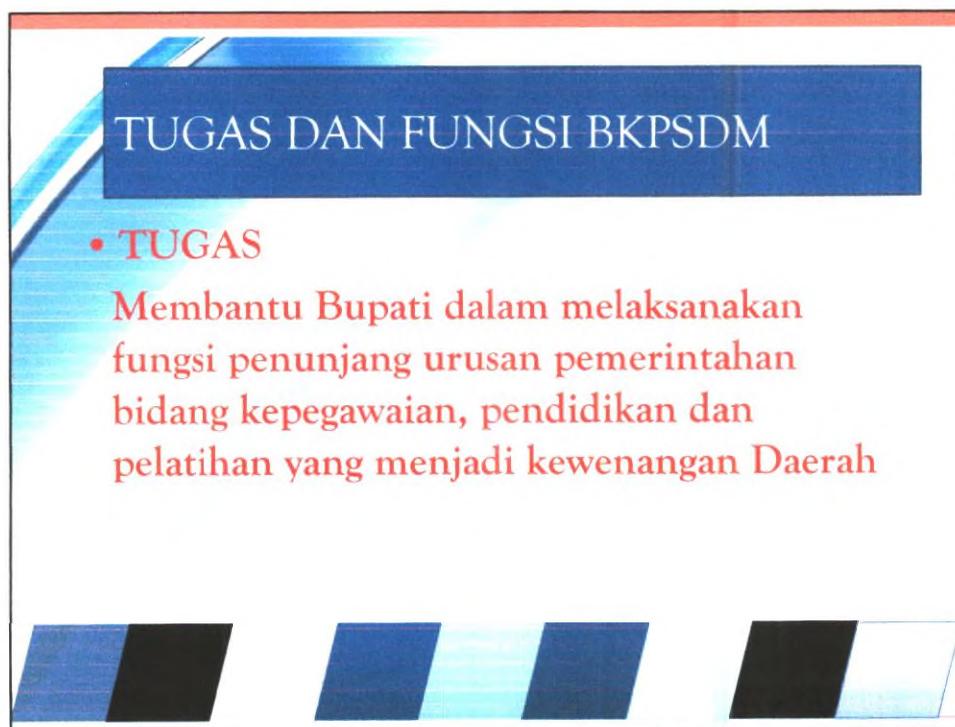
**TUJUAN**

**UMUM**

Untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah

**KHUSUS**

- Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya;
- Menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja PD tahun 2023;
- Menyesuaikan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif.



## KONDISI SDM BKPSDM SAAT INI

### PEJABAT STRUKTURAL (7 orang)

- Eselon II = 1 orang
- Eselon III = 4 orang
- Eselon IV = 2 orang

### PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU (7 orang)

- Arsiparis = 1 orang
- Analisis Pengembangan Sumber Daya Aparatur = 7 orang
- Pranata Komputer = 6 orang
- Perencana = 1 orang

### PEJABAT FUNGSIONAL UMUM (26 orang)

## KONDISI UMUM BKPPD SAAT INI

### SARANA KERJA

- Meja/kursi kerja (baik)
- Komputer 85 unit , baik = 17 unit, kurang baik= 68 unit
- Notebook 12 unit (4 baik, 8 kurang baik)
- Kendaraan roda empat sebanyak 4 unit (2 baik, 2 kurang baik)
- Kendaraan roda 2 sebanyak 21 unit (Baik 13 unit, Kurang baik 8 unit)

**PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023 YANG TERKAIT DENGAN TUPOKSI BKPSDM**

**Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan**

**Strategi:**

1. **ASSESMENT JPT, PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS**
2. **BINTEKES. 2; 2X SETAHUN**

**Upaya lain untuk pengembangan SDM :**

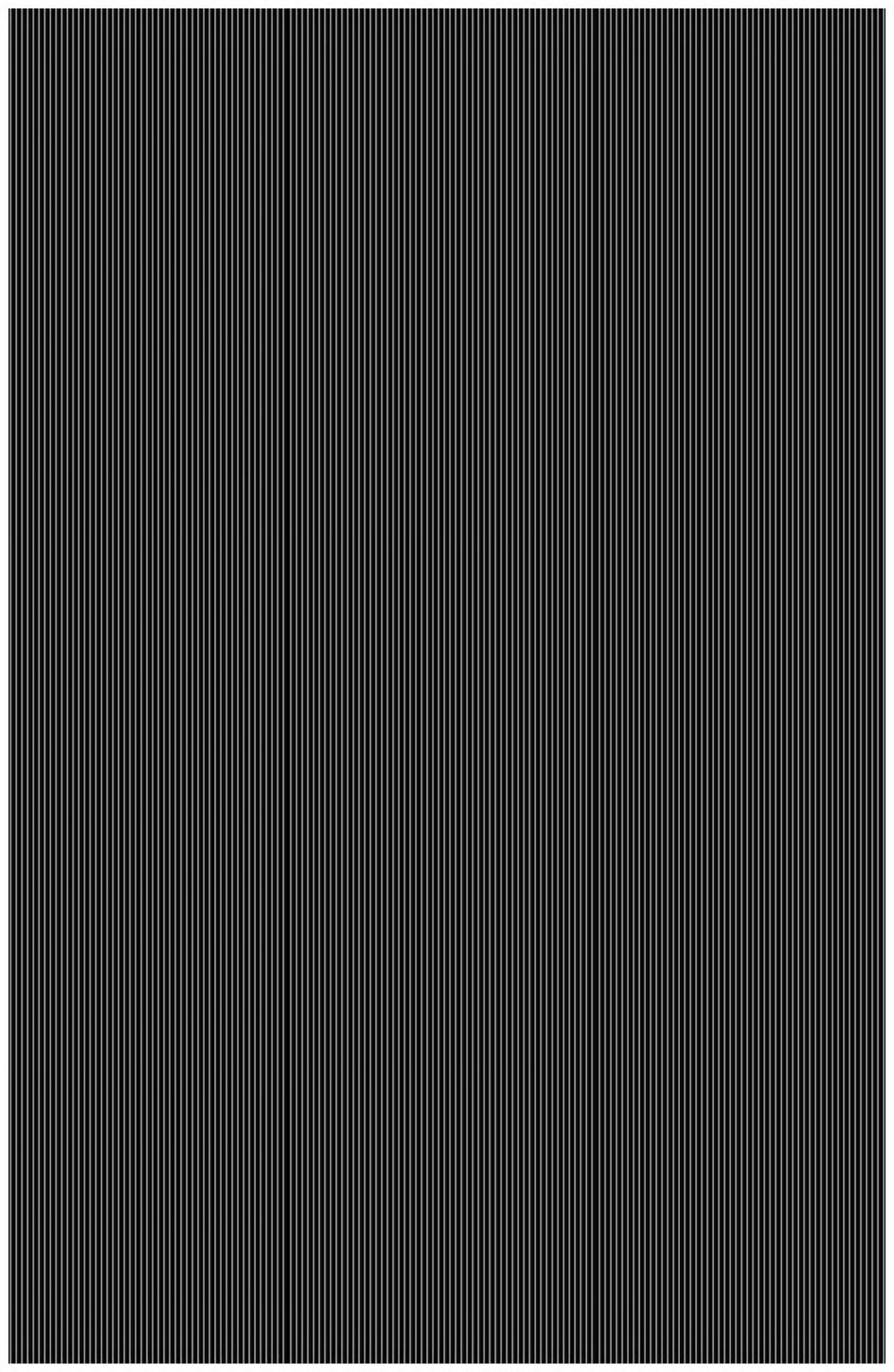
1. Memantapkan Pelayanan Publik melalui penguatan partisipasi dan keterbukaan informasi publik
2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
3. Memantapkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui peningkatan kualitas ASN yang berintegritas, professional, inovatif, berorientasi pelayanan, berkinerja, kompeten, dan disiplin,
4. Mengirim ASN yang mengikuti Diklat Fungsional ke Lembaga Diklat, Pelatihan Dasar CPNS dan Pejabat Struktural yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan (PKN Tk. II, PKA dan PKP)

**PP 11 TAHUN 2017  
MANAJEMEN ASN**

**PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, POLA KARIER, PROMOSI DAN MUTASI**

- Dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan profesionalitas PNS.
- Setiap instansi wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen Karier yg merupakan bagian terintegrasi dari Sistem Informasi ASN

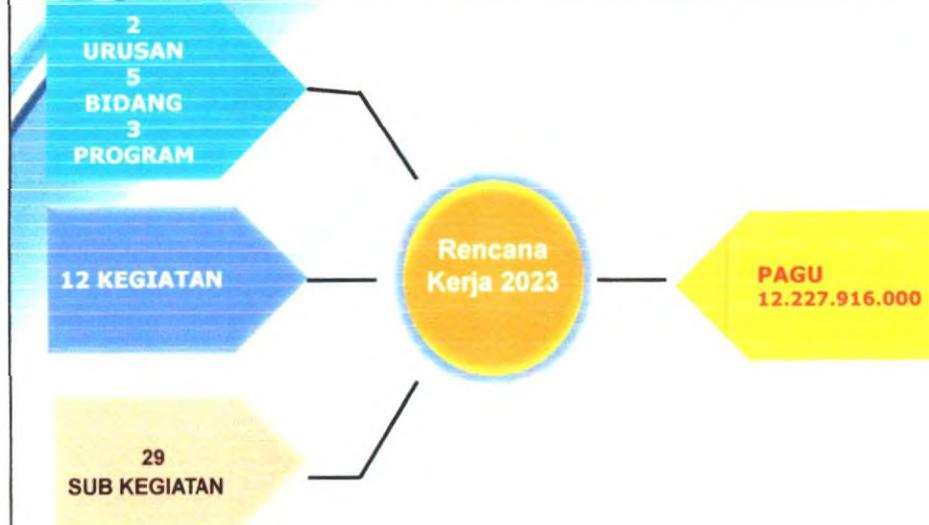
PENGEMBANGAN KARIER	PENGEMBANGAN KOMPETENSI	POLA KARIER	PROMOSI DAN MUTASI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• kejelasan dan kepastian karier kepada PNS</li> <li>• berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah</li> <li>• Dilakukan melalui mutasi dan/atau promosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diklat, seminar, kursus, penataran, sekolah/pelatihan kader dan magang</li> <li>• paling kurang 80 jam pelajaran dalam 1 tahun</li> <li>• Prinsip Dasar: PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama didasarkan pada penilaian kinerja dan penilaian kompetensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan standar jabatan dan standar kompetensi jabatan</li> <li>• Pola karier nasional dan Instansional.</li> <li>• Berbentuk horizontal, vertikal dan diagonal</li> <li>• Prinsip Dasar: untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan penyelenggaraan tugas-nya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi menyusun perencanaan mutasi</li> <li>• Atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier</li> <li>• paling cepat 2 tahun dan paling lama 5 tahun</li> </ul>



## PERMASALAHAN POKOK KEPEGAWAIAN DI PEMKAB KEBUMEN

- Kurangnya kuantitas maupun kualitas pegawai;
- Penataan PNS belum seluruhnya berdasar pada kompetensi jabatan;
- Pengembangan Profesionalisme PNS belum Optimal;
- Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan kepegawaian.

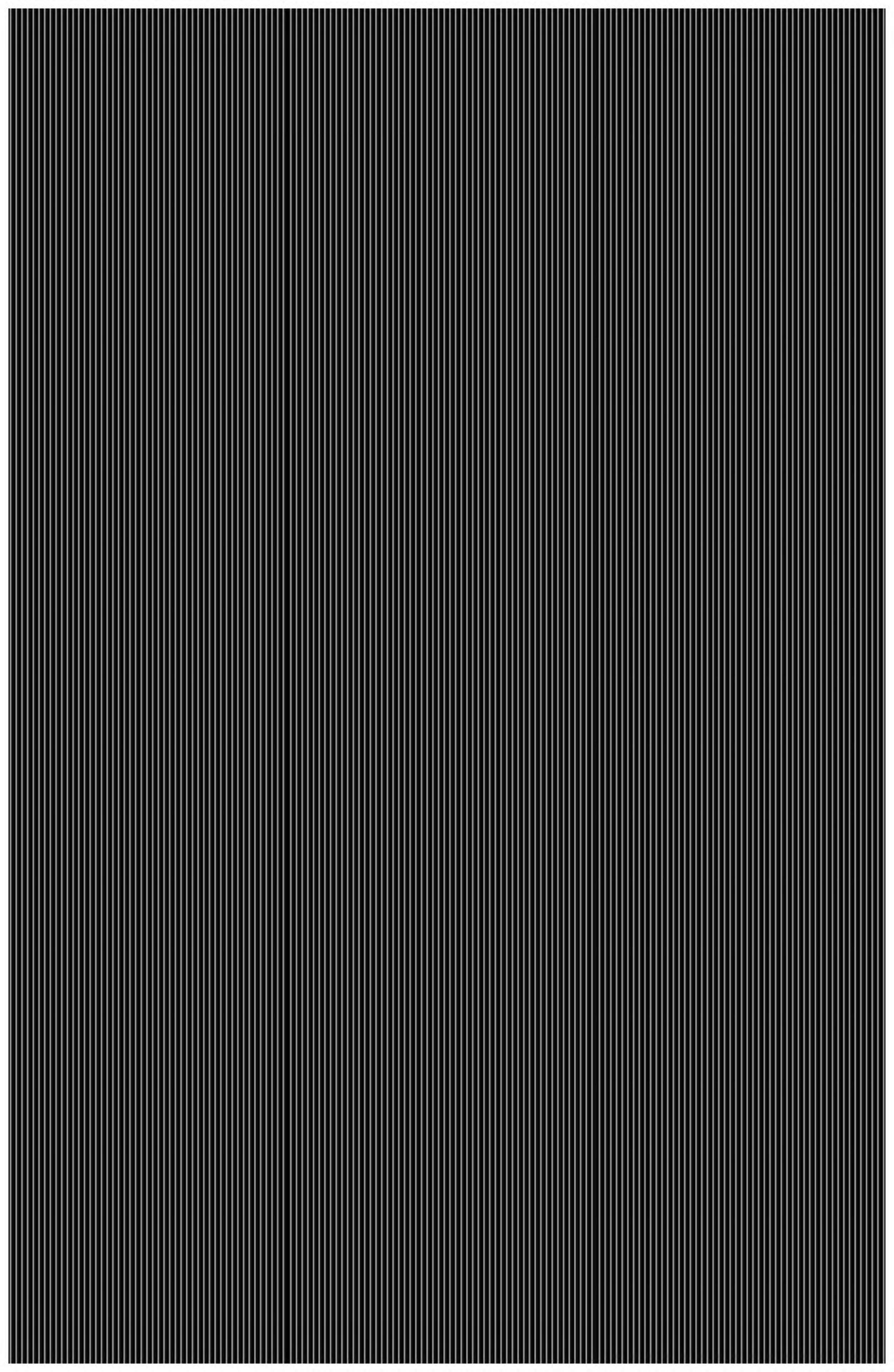
## RENCANA KERJA 2023





**PROGRAM BKPSDM TAHUN 2023**

NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.313.632.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM	3.103.691.000
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.088.886.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>12,227,916,000</b>



Microsoft PowerPoint interface showing a slide titled "KONDISI UMUM BKPPD SAAT INI".

### SARANA KERJA

- Meja/kursi kerja (baik)
- Komputer 30 unit , baik = 31 unit, rusak berat = 5 unit
- Notebook 15 unit (11 baik, 4 rusak berat)
- Kendaraan roda empat sebanyak 5 unit (3 baik, 2 kurang baik)
- Kendaraan roda 2 sebanyak 25 unit (Baik 20 unit, Kurang baik 5 unit)

**ANGGARAN PER PROGRAM/kegiatan**

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target	Sasaran
3	<b>Administrasi Umum</b>			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000	12 bulan	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19,037,000	12 bulan	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	18,000,000	12 bulan	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	1,200,000	12 bulan	
5	Penyediaan Bahan/Material	21,500,000	12 bulan	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25,000,000	12 orang/kali	
7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20,000,000	1 unit	
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60,000,000	5 unit	
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000	1 unit	
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	12 bulan	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115,996,000	12 bulan	
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 000.000	12 bulan	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46,500,000	12 bulan	
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000	20 unit	
15	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,000,000	1 unitt	

### ANGGARAN PER PROGRAM/KEGIATAN

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran
1	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>1,856,750,000</b>	
2	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>1,108,000,000</b>	
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1,008,000,000	Untuk seleksi CPNS formasi 575 org,
2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	50,000,000	Penyelesaian Administrasi Pensiun PNS 600 orang
3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	150,000,000	Rakor Sistem Informasi Kepegawaian 2 x, dan i Sim Gaji 2 x , Koordinasi Integrasi Simpeg dengan SAPK

### ANGGARAN PER PROGRAM /KEGIATAN

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran
1	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>1,856,750,000</b>	
2	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>466,750,000</b>	
1	Pengelolaan Mutasi ASN	170,000,000	Terfasilitasinya Pengambilan Sumpah PNS 220 orang, Terfasilitasinya usulan Pemindahan Tugas/ Mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, mutasi masuk dan keluar Pemkab Kebumen 150 orang Terfasilitasinya Kenaikan Pangkat PNS sejumlah 900 orang
2	Pengelolaan Promosi ASN	520.000.000	Terfasilitasinya ASN yang mengikuti Assessment (JPT, Adminstrator, Pengawas dan JFU) 200 orang Terlaksananya Seleksi Terbuka JPT Pratama dan atau Mutasi JPT Pratama 3 kali Terlaksananya penataan Pejabat sesuai dengan nomenklatur jabatan 300 orang

### ANGGARAN PER PROGRAM /KEGIATAN

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran
1	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>1,856,750,000</b>	
3	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>220,000,00</b>	
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	149000000	Terfasilitasinya Pengurusan Cuti 200 orang dan Uji Kesehatan Terfasilitasinya pengurusan JKK/JKM PNS 10 orang Terfasilitasinya pengusulan Penghargaan SLKS 150 orang
2	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	71,000,000	Terlaksananya monitoring penegakan disiplin PNS 24 OPD Terlaksananya sidang cerai 20kali Terlaksananya sidang kasus 6 kali Terlaksananya Sosialisasi SKP dan PPK PNS 2 kali

### ANGGARAN PER PROGRAM/kegiatan

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>3,499,000,000</b>	
1	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>450,000,00</b>	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	450,000,000	Terlaksananya Bimtek bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 2 kali, terfasilitasinya pejabat yang mengikuti Bimtek Penyusunan RPJMD 10 orang Terfasilitasinya PNS yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola Kepegawaian 45 orang Terfasilitasinya PNS yang mengikuti pelatihan teknis di Lembaga Diklat Provinsi/ Pusat 8 orang Terlaksananya Pengiriman Program Pemantapan Pimpinan Daerah ke Lemhannas RI 1kali
2	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3,049,000,000	Terfasilitasinya ASN yang mengikuti Diklat Fungsional ke Lembaga Diklat 8 orang, terfasilitasinya ASN yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS 305 orang Terfasilitasinya Pejabat Struktural yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan (PKN Tk. II, PKA dan PKP) 23 orang Terselenggaranya Rakor Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) 1 kali

### ANGGARAN PER PROGRAM/kegiatan

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
3	Peningkatan Kapasitas ASN	62,000,000	
1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	50,000,000	Terfasilitasinya ASN yang dikirim untuk mengikuti Ujian Dinas, Ujian PI, 150 orang Terlaksananya pemrosesan terbitnya Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar Terfasilitasinya PNS yang mendapatkan Bantuan Tugas Belajar dalam rangka pengembangan SDM 7 orang
2	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	45,000,000	Pengangkatan JFT, alih jenjang, pemberhentian JFT, pelantikan JFT 200 orang

BKPPD KBM

Terima  
kasih